

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.
- Denny Indrayana, *Indonesia Optimis: Demokrasi dan Negara Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2011.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saldi Isra, *Pemilu, Demokrasi, dan Konstitusi* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo: *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

B. Jurnal

- “Urgensi Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi,” Electoral Governance: *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 6, No. 2 (Mei 2025): 189–202, <http://www.jurnal.kpu.go.id/>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” Edumaspul: *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.4108>.
- Ahmad, dan Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip *The Guardian of the Constitution*.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 797.
- Arifin, Fahrur Rozi. “Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia.” *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 9, no. 2 (2025): 101–120. <https://doi.org/10.25105/staatsrecht.v9i2.36332>.

- Arifin, Firdaus. "Batas Usia Calon Kepala Daerah: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Daerah." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 4 (Oktober–Desember 2024): 70–77. <https://doi.org/10.51825/yta.v4i4.28414>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.2020.20-33>.
- Fadillah, dan Leo Dwi Cahyono. "Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif." *Jurnal Kajian Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2025): 232.
- Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019): 130–139. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/2501>.
- Hanafi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang." *Ekspose* 16, no. 1 (2017): 349–360. doi: 10.31942/ekspose.v16i1.1737.
- Haqiqi, Muhammad, Erland Ferdinansyah, dan Kahlil Rida. "Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024–2029." *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN)* 3, no. 2 (2024): 149–166. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.163>.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4, 779–780.
- Hasim, Djamil, Asmadiano, dan Edyanto. "Implementasi Merit System dalam Tata Kelola Birokrasi." *Journal Governance and Politics* 5, no. 2 (2025): 13.
- Hidayah, Siti Nurul. "Teori Pilihan Rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia." *Jurnal Integritas* 5, no. 2 (2019): 99.
- Hidayat, Agus, Asti Wasiska, dan Ahmad Faiza. "Evaluasi Kebijakan Persyaratan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7.
- Hidayat, Agus, Asti Wasiska, dan Ahmad Faisal. "Evaluasi Kebijakan Persyaratan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 369–383. <https://doi.org/10.59723/innovative.v4i6.333>.

- Mahendra, Yusril Ihza. "3 Paradoks Demokrasi di Indonesia Tahun 2014–2019: Analisis Prosedural dan Substansial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2021): 32.
- Noer, Hamka Hendra. "Patologi Kelembagaan Demokrasi Elektoral: Korupsi Politik di Indonesia Pasca-Reformasi." *AEGIS* 9, no. 1 (July 2025): 105–106.
- Pradityo, R. Yudhy, dan Pancaningsih. "Peran Meritokrasi Melalui Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, no. 1 (April 2025): 30–37. <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.849>.
- Pramusinto, Agus. "Merit System dalam Birokrasi Indonesia." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 23, no. 2 (2019): 119–121.
- Putri, Rizky Amalia. "Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda?" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 13, no. 1 (2025): 5.
- Putuwidhati, Achmad Yusuf, dan Moh. Saleh. "Konstitusionalitas Penentuan Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 477–489. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.8421>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 399–340.
- Rishan, Idul. "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Open Legal Policy." *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* (2024): 588.
- Rizqullah, Azka Afdhalul, et al. "Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* (2025): 3.
- Rosyada, Ikhsan. "Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2018): 240.
- Rosyan, Adam Nurfaizi, dan Eko Prasajo. "Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi." *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 12, no. 1 (2024): 47–63. <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>.
- Sabani, Agil, dan Nandhika Aulia. "Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi dalam Instansi Pemerintahan Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 21–33. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>.
- Sarkol, Magdalena E. J. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Lex Administratum* 3, no. 7 (September 2015): 66–72. Accessed October

21,2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9062>.

Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 562.

Sofyan, Thahir Haning, dan Tang Abdullah. "Meritokrasi dalam Promosi Jabatan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (Desember 2022): 17883–17895. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10759>.

Sulaiman, Kamal, Oktav Prananda, Muhammad Iqbal Faedillah, Andrew Rearizky, dan Dimas Dwi Haryanto. "Sistem Meritokrasi dalam Upaya Penerapan Good Governance di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 3 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.62383/triwikrama.v8i3.447>.

Sundariwati, Ni Luh Dewi. "Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional atau Transisi Menuju Juristocracy." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2023): 5.

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri. "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66. <https://doi.org/10.1342/tarbiyah.v2i1.25>.

Tan, Petrus. "Tirani Meritokrasi dan Reimajinasi Solidaritas: Sebuah Kajian Berdasarkan Perspektif Michael Sandel." *Jurnal Ledalero* 22, no. 1 (Juni 2023): 1–19. DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.332.1-19>.

Wardhana, Allan Fatchan Gani. "Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 206–229. doi: 10.20885/iustum.vol23.iss2.art1.

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 204.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Dalam Satu Naskah* (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal, tanpa tahun),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 tentang *Pengujian Persyaratan Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tentang *Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang *Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang *Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 tentang *Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

E. Website

Kabupaten yalimo, Komisi pemilihan umum, “apa itu meritokrasi dan mengapa penting bagi demokrasi modern,” *kpu kab-yalimo*, diakses pada 18 februari 2026, https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8229_apa-itu-meritokrasi-dan-mengapa-penting-bagi-demokrasi-modern?utm_source=chatgpt.com.